

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2025 s/d Bulan Juni BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET																		
Anggaran masih level Sub Kegiatan, belum output tertentu yang mendukung.																		
No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni		Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Pr
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi							
1	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	78.828.746.232	45,52	52,94	-7,42	35.843.830.069	45,47	24.322.327.618	30,85	14,62							
1.1	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.638.500	66,27	64,23	2,04	4.846.000	63,44	4.644.000	60,80	2,64							
1.1.1	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.620.000	85,61	76,00	9,61	2.235.000	85,31	2.235.000	85,31	0,00						1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Indikator SIPD) : 5 dokumen dari 6 dokumen 2. Berita Acara Forum OPD : 1 dokumen dari 1 dokumen 3. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah berupa Dokumen RENJA Perangkat Daerah Tahun 2026 : 0 dokumen dari 1 dokumen 4. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah berupa Dokumen Perjanjian Kinerja : 1 dokume dari 1 dokume 5. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah berupa Dokumen ROPK : 1 dokumen dari 1 dokumen 6. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah berupa Dokumen Perubahan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2025 : 1 dokumen dari 1 dokumen 7. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah berupa Dokumen Renstra : 1 dokumen dari 1 dokumen Tahapan pekerjaan (fisik) 1. Terselasaikannya dokumen 2. Tersedianya ROPK Fisik 2026 3. Dokumen Perubahan Rens terusun Faktor Penghambat: sesuai target Faktor Pendukung: 1. Komunikasi yang terjalin b OPD sehingga dinamika peny perencanaan dapat direspon 2. Kerjasama dan kolaborasi sehingga pelaksanaan kegiatan dengan baik dan menghasilkan target 3. Peraturan Daerah DIY No. APBD 2025 4. Peraturan Gubernur DIY N Kedudukan, susunan organis kerja Badan Pengelola Keuan 5. Peraturan Gubernur DIY N tentang Penjabaran APBD 20 6. DPA Nomor : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.0 Desember 2024 7. SDM yang kompeten 8. Sarana dan Prasarana yang	
1.1.2	5.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.450.500	49,90	50,50	-0,60	1.568.000	45,44	1.420.000	41,15	4,29						1. Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD (Indikator SIPD) : 1 dokumen dari 2 dokumen 2. Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD berupa Dokumen DPA SKPD Tahun 2026 : 0 dokumen dari 1 dokumen 3. Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD berupa Dokumen Perubahan DPA SKPD Tahun 2025 : 1 dokumen dari 1 dokumen Tahapan pekerjaan (fisik) Tersusunnya Dokumen Pelaks Anggaran Satuan Kerja Peran DPPA/A.2/5.02.0.00.0.00.04.0 Maret 2025 Faktor Penghambat: Aplikasi SIPD Penatausahaan kendala akses dan terdapat d Rp. 148.000,- pada Belanja b dikarenakan terdapat selisih ha Faktor Pendukung: 1. Kerjasama dan kolaborasi sehingga pelaksanaan kegiatan dengan baik dan menghasilkan target 2. Peraturan Daerah DIY No. APBD 2025 3. Peraturan Gubernur DIY N Kedudukan, susunan organis kerja Badan Pengelola Keuan 4. DPPA Nomor : DPPA/A.2/5.02.0.00.0.00.04.0 Maret 2025 6. SDM yang kompeten 7. Sarana dan Prasarana yang	
1.1.3	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.568.000	69,96	74,80	-4,84	1.043.000	66,52	989.000	63,07	3,45						1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Indikator SIPD) : 5 dokumen dari 7 dokumen 2. Dokumen LKJIP : 1 dokumen dari 1 dokumen 3. Dokumen LPPD : 1 dokumen dari 1 dokumen Tahapan pekerjaan (fisik) 1. Tersusunnya laporan evalua 2. Tersusunnya dokumen LKJ Faktor Penghambat: Terdapat deviasi keuangan se Belanja bahan komputer mer Mbiz market	

Anggaran masih level Sub Kegiatan, belum output tertentu yang mendukung.

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Keuangan								Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Pr
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																4. LKPJ : 1 dokumen dari 1 dokumen 5. Laporan timbal balik money triwulan I - IV : 2 dokumen dari 4 dokumen	Faktor Pendukung: 1. Kerjasama dan kolaborasi sehingga pelaksanaan kegiatan dengan baik dan menghasilkan target 2. Peraturan Daerah DIY No. APBD 2025 3. Peraturan Gubernur DIY No. Kedudukan, susunan organisasi kerja Badan Pengelola Keuangan 4. Peraturan Gubernur DIY No. tentang Penjabaran APBD 2024 5. DPA Nomor : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.00 Desember 2024 6. SDM yang kompeten 7. Sarana dan Prasarana yang
1.2	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	76.159.861.482	45,31	53,00	-7,69	34.512.820.669	45,32	23.170.281.873	30,42	14,90						
1.2.1	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	76.132.541.982	45,31	53,00	-7,69	34.497.270.669	45,31	23.155.111.773	30,41	14,90					1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN : 240 orang dari 240 orang	Tahapan pekerjaan (fisik) 1. Terlaksananya peremajaan Mei 2. Terlaksananya pembayarar pegawai ASN BPKA DIY 3. Tersusunya laporan gaji dan Faktor Penghambat: Realisasi fisik sudah sesuai target deviasi keuangan sebesar Rp. menyesuaikan kondisi data pada dari : 1. Belanja Gai Pokok PNS Rp. 5.004.706,- 2. Belanja Gaji Pokok PPPK sebesar Rp. 1.060.000.000,- 3. Belanja Tunjangan Keluarganya 816.367.171,- 4. Belanja Tunjangan Keluarga 337.288.914,- 5. Belanja Tunjangan Jabatan 98.110.000,- 6. Belanja Tunjangan Fungsional 67.580.000,- 7. Belanja Tunjangan Fungsional 891.000.000,- 8. Belanja Tunangan Fungsional 497.005.000,- 9. Belanja Tunjangan Beras P. 71.604.163,- 10. Belanja Tunjangan Beras 12.237.380,- 11. Belanja Tunjangan PPH/TPP 5.004.706,- 12. Belanja Pembulatan Gaji I 12.237.380,- 13. Belanja Pembulatan Gaji I 12.237.380,- 14. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan 329.953.538,- 15. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan 71.604.163,- 16. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan 12.237.380,- 17. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan sebesar Rp. 1.841.837,- 18. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan 36.711.772,- 19. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan 9.719.717,- 20. Belanja simpanan Taperuan 7.055.490,- 21. Belanja TPP PNS Rp. 1.060.000.000,- 22. Belanja TPP PPPK Rp. 166.000.000,- 23. Belanja insentif pajak air 7.055.490,- Faktor Pendukung: 1. Peraturan Daerah DIY No. APBD 2025 2. Peraturan Gubernur DIY No. Kedudukan, susunan organisasi kerja Badan Pengelola Keuangan 3. Peraturan Gubernur DIY No. tentang Penjabaran APBD 2024 4. DPA Nomor :

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Pr
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.00 Desember 2024 5. SDM yang kompeten 6. Sarana dan Prasarana yang
1.2.2	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	19.320.000	50,70	51,20	-0,50	9.720.000	50,31	9.720.000	50,31	0,00					1. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD : 6 dokumen dari 12 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) 1. Tersedianya rekapitulasi pe obyek kegiatan s.d. bulan Jur 2. Tersedia nya rekapitulasi p obyek penerimaan s.d. bulan 3. Terlaksananya entry data r kegiatan 4. Tersusunya pertanggungja bulan Mei Faktor Penghambat: Sesuai target Faktor Pendukung: 1. Peraturan Daerah DIY No. APBD 2025 2. Peraturan Gubernur DIY N Kedudukan, susunan organis kerja Badan Pengelola Keuan 3. Peraturan Gubernur DIY N tentang Penjabaran APBD 20 4. DPA Nomor : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.00 Desember 2024 5. SDM yang kompeten 6. Sarana dan Prasarana yang
1.2.3	5.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.999.800	100,00	100,00	0,00	4.999.800	100,00	4.619.900	92,40	7,60					1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD : 1 laporan dari 1 laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) Terselesaikannya laporan keu Faktor Penghambat: sesuai target, Terdapat devia merupakan efisiensi, realisasi Faktor Pendukung: 1. Peraturan Daerah DIY No. APBD 2025 2. Peraturan Gubernur DIY N Kedudukan, susunan organis kerja Badan Pengelola Keuan 3. Peraturan Gubernur DIY N tentang Penjabaran APBD 20 4. DPA Nomor : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.00 Desember 2024 5. SDM yang kompeten 6. Sarana dan Prasarana yang
1.2.4	5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	2.999.700	32,00	42,00	-10,00	830.200	27,68	830.200	27,68	0,00					1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/SemesteranSKPD : 1 laporan dari 1 laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) Terselesaikannya dokumen pr Faktor Penghambat: sesuai target Faktor Pendukung: 1. Peraturan Daerah DIY No. APBD 2025 2. Peraturan Gubernur DIY N Kedudukan, susunan organis kerja Badan Pengelola Keuan 3. Peraturan Gubernur DIY N tentang Penjabaran APBD 20 4. DPA Nomor : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.00 Desember 2024 5. SDM yang kompeten 6. Sarana dan Prasarana yang
1.3	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	34.100.000	50,30	52,80	-2,50	17.060.000	50,03	17.056.000	50,02	0,01						
1.3.1	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	34.100.000	50,30	52,80	-2,50	17.060.000	50,03	17.056.000	50,02	0,01					1. umlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD : 6 laporan dari 12 laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) Tersedianya sarana pendukur Tersedia nya data inventaris: bulan Juni Faktor Penghambat: Terdapat deviasi keuangan se merupakan efisiensi

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Pr
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	Faktor Pendukung: 1. Peraturan Daerah DIY No. APBD 2025 2. Peraturan Gubernur DIY No. Kedudukan, susunan organisasi kerja Badan Pengelola Keuangan 3. Peraturan Gubernur DIY No. tentang Penjabaran APBD 2024 4. DPA Nomor : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.00 Desember 2024 5. SDM yang kompeten 6. Sarana dan Prasarana yang
1.4	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.483.000	86,00	86,00	0,00	4.655.000	84,90	4.179.000	76,22	8,68						
1.4.1	5.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5.483.000	86,00	86,00	0,00	4.655.000	84,90	4.179.000	76,22	8,68					1. Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai : 6 dokumen dari 12 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) Tersusunnya dokumen money Pegawai Pelaksanaan Pembinaan PPPK di lingkungan BPKA pada Bul Faktor Penghambat: Terdapat penilaian kinerja bel terpenuhi dikarenakan kelalai PPPK ASN Tahap I dan CPNS dan memahami hak dan kewi ASN Terdapat deviasi keuangan se terdiri dari : 1. Belanja ATK sebesar Rp. 3: efisiensi 2. Belanja kertas/cover sebes merupakan efisiensi 3. Belanja makan minum rap Faktor Pendukung: Penilaian kinerja pegawai ters waktu Seluruh PPPK ASN Tahap I da BPKA hadir
1.5	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	501.128.050	55,93	55,93	0,00	262.546.700	52,39	176.596.670	35,24	17,15						
1.5.1	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.558.600	59,00	59,00	0,00	5.299.000	55,44	5.253.800	54,96	0,48					1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : 1 paket dari 1 paket	Tahapan pekerjaan (fisik) Tersedianya komponen instalasi baterai Tersedianya komponen instalasi LED Faktor Penghambat: Terdapat deviasi sebesar Rp. angkas s.d bulan Juni Faktor Pendukung: 1. Peraturan Daerah DIY No. APBD 2025 2. Peraturan Gubernur DIY No. Kedudukan, susunan organisasi kerja Badan Pengelola Keuangan 3. Peraturan Gubernur DIY No. tentang Penjabaran APBD 2024 4. DPA Nomor : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.00 Desember 2024 5. SDM yang kompeten 6. Sarana dan Prasarana yang
1.5.2	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	128.473.600	50,57	50,57	0,00	61.684.700	48,01	58.122.100	45,24	2,77					1. Jumlah Paket Peralatandan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 3 paket dari 4 paket	Tahapan pekerjaan (fisik) Tersedianya kebutuhan alat tulis Tersedianya kebutuhan kertas Tersedianya kebutuhan bahan Faktor Penghambat: Pengadaan bisa kurang maks Kertas dan Cover, dan Bahan dibutuhkan namun tidak tera Terdapat deviasi keuangan se terdiri dari : 1. Belanja alat tulis kantor Rp

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Pr
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	2. Belanja kertas dan cover R 3. Belanja bahan komputer R merupakan sisa angkas samp 2025 Faktor Pendukung: Pengadaan dilaksanakan sesu 1. Peraturan Daerah DIY No. APBD 2025 2. Peraturan Gubernur DIY N Kedudukan, susunan organis kerja Badan Pengelola Keuan 3. Peraturan Gubernur DIY N tentang Penjabaran APBD 20 4. DPA Nomor : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.0 Desember 2024 5. SDM yang kompeten 6. Sarana dan Prasarana yang
1.5.3	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.769.000	50,14	50,14	0,00	6.282.000	45,62	6.139.000	44,59	1,03					1. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tanggayang Disediakan : 1 paket dari 1 paket	Tahapan pekerjaan (fisik) Tersedianya bahan kebutuhar berupa bahan kebersihan kan kantor Faktor Penghambat: Terdapat deviasi keuangan se merupakan sisa angkas s,d, t Faktor Pendukung: Pengadaan dilaksanakan sesu 1. Peraturan Daerah DIY No. APBD 2025 2. Peraturan Gubernur DIY N Kedudukan, susunan organis kerja Badan Pengelola Keuan 3. Peraturan Gubernur DIY N tentang Penjabaran APBD 20 4. DPA Nomor : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.0 Desember 2024 5. SDM yang kompeten 6. Sarana dan Prasarana yang
1.5.4	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	34.364.850	43,05	43,05	0,00	14.330.000	41,70	13.919.000	40,50	1,20					1. Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan : 1 paket dari 3 paket	Tahapan pekerjaan (fisik) Tersedianya barang kebutuha berkop Tersedianya barang kebutuha coklat casing Tersedianya dokumen surat s Tersedia nya bahan cetak ber Faktor Penghambat: Terdapat deviasi keuangan se merupakan sisa angkas samp 2025 Faktor Pendukung: Pengadaan dilaksanakan sesu 1. Peraturan Daerah DIY No. APBD 2025 2. Peraturan Gubernur DIY N Kedudukan, susunan organis kerja Badan Pengelola Keuan 3. Peraturan Gubernur DIY N tentang Penjabaran APBD 20 4. DPA Nomor : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.0 Desember 2024 5. SDM yang kompeten 6. Sarana dan Prasarana yang
1.5.5	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10.356.000	50,08	50,08	0,00	5.178.000	50,00	4.680.000	45,19	4,81					1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan : 3 dokumen dari 3 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) Tersedianya bahan bacaan (l Pos, Tempo, Kompas) s.d. bu Faktor Penghambat: Realisasi fisik sesuai target, t sebesar Rp. 498.000,- merup dengan bulan Juni Faktor Pendukung: Pengadaan dilaksanakan sesu

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Pr
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
1.5.6	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	203.860.000	64,45	64,45	0,00	119.600.000	58,67	49.548.970	24,31	34,36					1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 6 laporan dari 12 laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) 1. Tersedianya bahan jamuan 2. Tersedianya bahan jamuan 3. Terpenuhinya biaya perjala daerah Faktor Penghambat: Terdapat deviasi keuangan se terdiri dari : 1. Belanja makan minum rapi 15.874.500,- karena anggaran 2. Belanja perjalanna dinas lu karena Perjalanan dinas hany undangan dari instansi pusat, ketugasan urgent Faktor Pendukung: 1. Peraturan Daerah DIY No. APBD 2025 2. Peraturan Gubernur DIY N Kedudukan, susunan organis kerja Badan Pengelola Keuan 3. Peraturan Gubernur DIY N tentang Penjabaran APBD 20 4. DPA Nomor : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.0 Desember 2024 5. SDM yang kompeten 6. Sarana dan Prasarana yang 7. Membantu penyelenggaraa
1.5.7	5.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100.746.000	51,03	51,03	0,00	50.173.000	49,80	38.933.800	38,65	11,15					1. Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD : 4369 dokumen dari 12000 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) Penyusunan SK Kaban tentan Penyusutan Arsip Tahun 2025 Melakukan pemindahan arsip (depo arsip kotagede) Memberikan ekstra fooding b record center (depo arsip kot Faktor Penghambat: Arsip Inaktif terus bertambah sumber daya terbatas Terdapat deviasi keuangan se terdiri dari : 1. Belanja ATK Rp. 3.000.000 selisih harga pasar dengan SI 3. Belanja bahan komputer R 4. Belanja makan minum rapi 4. Belanja fumigasi sebesar R karenakan adanya selisih har harga pasar pada belanja fun Faktor Pendukung: Adanya pendampingan dari D Alat angkut untuk pemindaha Pengadaan dilaksanakan ses
1.6	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	148.690.000	100,00	100,00	0,00	148.690.000	100,00	145.246.300	97,68	2,32						
1.6.1	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	148.690.000	100,00	100,00	0,00	148.690.000	100,00	145.246.300	97,68	2,32					1. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya : 6 unit dari 6 unit	Tahapan pekerjaan (fisik) Pengadaan peralatan dan me dilaksanakan Faktor Penghambat: Realisasi Sesuai angkas terda 3.443.700,- Faktor Pendukung: Penyedia dapat menyediakan
1.7	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.596.278.000	45,36	45,36	0,00	709.998.000	44,48	629.064.184	39,41	5,07						
1.7.1	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.250.000	48,74	48,74	0,00	7.750.000	47,69	6.141.100	37,79	9,90					1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat : 1 laporan dari 1 laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) Tersedianya benda pos / mat Terekirimkannya surat surat c Faktor Penghambat: Terdapat deviasi keuangan se pada Belanja jasa pengiriman

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Pr
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	realisasi menyesuaikan kebut Faktor Pendukung: 1. Peraturan Daerah DIY No. APBD 2025 2. Peraturan Gubernur DIY No. Kedudukan, susunan organisasi kerja Badan Pengelola Keuangan 3. Peraturan Gubernur DIY No. tentang Penjabaran APBD 2024 4. DPA Nomor : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.00 Desember 2024 5. SDM yang kompeten 6. Sarana dan Prasarana yang
1.7.2	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	918.880.000	50,07	50,07	0,00	459.388.000	49,99	385.659.474	41,97	8,02					1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : 6 laporan dari 12 laporan Faktor Penghambat: Dikarenakan anggaran merup. realisasi menyesuaikan kebut sebesar Rp. 73.728.526,- terdiri dari : 1. Belanja tagihan Telepon Rp. 2.4 2. Belanja tagihan Air Rp. 2.4 3. Belanja tagihan Listrik Rp. 4. Belanja tagihan fax/Zoom 1 Faktor Pendukung: 1. Peraturan Daerah DIY No. APBD 2025 2. Peraturan Gubernur DIY No. Kedudukan, susunan organisasi kerja Badan Pengelola Keuangan 3. Peraturan Gubernur DIY No. tentang Penjabaran APBD 2024 4. DPA Nomor : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.00 Desember 2024 5. SDM yang kompeten 6. Sarana dan Prasarana yang	
1.7.3	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	82.760.000	37,74	37,74	0,00	30.780.000	37,19	26.870.610	32,47	4,72					1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan berupa sewa pengharum ruangan : 1 laporan dari 1 laporan 2. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan berupa sewa mesin fotocopy : 1 laporan dari 1 laporan 3. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan berupa sewa tanaman hias : 1 laporan dari 1 laporan Faktor Penghambat: Kegiatan dilaksanakan sesuai 1. Peraturan Daerah DIY No. APBD 2025 2. Peraturan Gubernur DIY No. Kedudukan, susunan organisasi kerja Badan Pengelola Keuangan 3. Peraturan Gubernur DIY No. tentang Penjabaran APBD 2024 4. DPA Nomor : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.00 Desember 2024 5. SDM yang kompeten 6. Sarana dan Prasarana yang	
1.7.4	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	578.388.000	38,87	38,87	0,00	212.080.000	36,67	210.393.000	36,38	0,29					1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : 6 laporan dari 12 laporan Tahapan pekerjaan (fisik) Terpenuhihanya jasa keamanan Faktor Penghambat: Realisasi fisik sesuai target p deviasi keuangan sebesar Rp. 1. Belanja jasa kebersihan Rp. 2. Belanja jasa keamanan Rp.	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Keuangan								Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Pr
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	Faktor Pendukung: 1. Peraturan Daerah DIY No. APBD 2025 2. Peraturan Gubernur DIY No. Kedudukan, susunan organisasi kerja Badan Pengelola Keuangan 3. Peraturan Gubernur DIY No. tentang Penjabaran APBD 2024 4. DPA Nomor : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.00 Desember 2024 5. SDM yang kompeten 6. Sarana dan Prasarana yang
1.8	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	375.567.200	51,18	49,59	1,59	183.213.700	48,78	175.259.591	46,67	2,11						
1.8.1	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	18.726.000	26,06	26,06	0,00	4.800.000	25,63	3.000.000	16,02	9,61					1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya : 1 unit dari 1 unit	Tahapan pekerjaan (fisik) Tersedianya bahan bakar kendaraan Faktor Penghambat: Realiasi keuangan menyesuaikan sampai dengan bulan Mei terhitung sebesar Rp. 1.800.000,- pada Faktor Pendukung: 1. Peraturan Daerah DIY No. APBD 2025 2. Peraturan Gubernur DIY No. Kedudukan, susunan organisasi kerja Badan Pengelola Keuangan 3. Peraturan Gubernur DIY No. tentang Penjabaran APBD 2024 4. DPA Nomor : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.00 Desember 2024 5. SDM yang kompeten 6. Sarana dan Prasarana yang
1.8.2	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	221.007.200	41,00	38,94	2,06	83.921.700	37,97	79.723.111	36,07	1,90					1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya : 12 unit dari 17 unit	Tahapan pekerjaan (fisik) 1. Tersedianyan bahan bakar operasional 2. Terbayarkannya belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 4. Terbayarkannya belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 Faktor Penghambat: Realisasi fisik sesuai dengan target, terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 75.000,- 1. Belanja BBM dan pelumas 2. Belanja suku cadang sebesar 3. Belanja perizinan/pajak kendaraan 4. Belanja pemeliharaan kendaraan 75.000,- 5. Belanja pemeliharaan kendaraan 267.500,- Faktor Pendukung: 1. Peraturan Daerah DIY No. APBD 2025 2. Peraturan Gubernur DIY No. Kedudukan, susunan organisasi kerja Badan Pengelola Keuangan 3. Peraturan Gubernur DIY No. tentang Penjabaran APBD 2024 4. DPA Nomor : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.00 Desember 2024 5. SDM yang kompeten 6. Sarana dan Prasarana yang
1.8.3	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.834.000	64,35	61,80	2,55	34.492.000	61,78	33.248.000	59,55	2,23					1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : 37 unit dari 85 unit	Tahapan pekerjaan (fisik) Terlaksananya pemeliharaan pemeliharaan personal komputer Faktor Penghambat: Realisasi fisik sesuai target, terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 1.244.000,- merujuk sampai dengan bulan Juni 2024 1. Belanja pemeliharaan alat

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Keuangan								Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni		Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Pr
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi							
																		35.000,- merupakan efisiensi 2. Belanja pemeliharaan AC R 3. Belanja pemeliharaan kom 4. Belanja pemeliharaan Meb merupakan efisiensi Faktor Pendukung: 1. Peraturan Daerah DIY No. APBD 2025 2. Peraturan Gubernur DIY N Kedudukan, susunan organis kerja Badan Pengelola Keuan 3. Peraturan Gubernur DIY N tentang Penjabaran APBD 20 4. DPA Nomor : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.0 Desember 2024 5. SDM yang kompeten 6. Sarana dan Prasarana yang
1.8.4	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	80.000.000	76,00	76,00	0,00	60.000.000	75,00	59.288.480	74,11	0,89						1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : 4 unit dari 4 unit	Tahapan pekerjaan (fisik) Terlaksananya pemeliharaan (berupa pemeliharaan Gudang Faktor Penghambat: terdapat sisa angkas (efisiensi Rp. 711.520,- terdiri dari : 1. Belanja pemeliharaan gedu 166.520,- 2. Belanja pemeliharaan bang 545.000,- Faktor Pendukung: 1. Peraturan Daerah DIY No. APBD 2025 2. Peraturan Gubernur DIY N Kedudukan, susunan organis kerja Badan Pengelola Keuan 3. Peraturan Gubernur DIY N tentang Penjabaran APBD 20 4. DPA Nomor : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.0 Desember 2024 5. SDM yang kompeten 6. Sarana dan Prasarana yang
2	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	800.865.232.954	60,50	77,25	-16,75	467.996.970.832	58,44	255.891.598.651	31,95	26,49							
2.1	5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.091.794.500	12,28	28,86	-16,58	104.028.000	9,53	75.080.064	6,88	2,65							
2.1.1	5.02.02.1.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	34.456.000	55,00	55,00	0,00	18.400.000	53,40	12.672.870	36,78	16,62						1. Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Indikator SIPD) : 0 dokumen dari 2 dokumen 2. Jumlah Dokumen KUA yang Disusun : 0 dokumen dari 1 dokumen 3. Jumlah Dokumen KPPAS yang Disusun : 0 dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) Koordinasi dengan TAPD terk Tahun 2026 Faktor Penghambat: Penyusunan KUA PPAS belum bulan Juni ini masih pada tah Terdapat deviasi keuangan se terdiri dari : 1. Belanja bahan komputer R sisa angkas bln April (efisiensi 2. Belanja makan minum Rp. lebih banyak dilakukan secara Faktor Pendukung: 1. Peraturan Daerah DIY No. APBD 2025 2. Peraturan Gubernur DIY N Kedudukan, susunan organis kerja Badan Pengelola Keuan 3. Peraturan Gubernur DIY N tentang Penjabaran APBD 20 4. DPA Nomor : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.0 Desember 2024 5. SDM yang kompeten 6. Sarana dan Prasarana yang

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Pr
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
2.1.2	5.02.02.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	29.716.000	53,50	53,50	0,00	14.860.000	50,01	11.977.140	40,31	9,70	Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) bersama DPRD DIY secara resmi menandatangani Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025. Penandatanganan ini menjadi agenda pokok dalam Sidang Paripurna DPRD DIY yang digelar di Gedung DPRD DIY, Yogyakarta, Selasa (01/07). Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X, menyampaikan sambutan Gubernur DIY, mengungkapkan apresiasi mendalam kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas kerja sama dan dukungan konstruktif selama proses pembahasan dokumen perubahan KUA dan PPAS 2025. "Proses pembahasan ini mencerminkan pentingnya keselarasan pandangan atas perubahan asumsi makro yang melatarbelakangi perlunya penyesuaian arah kebijakan dan prioritas pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta," ujar Sri Paduka. Lebih lanjut, Sri Paduka menjelaskan bahwa dinamika sosial dan ekonomi yang berkembang saat ini menuntut adanya respons kebijakan yang adaptif dan berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat. Karena itu, dokumen perubahan KUA dan PPAS dipandang penting sebagai pedoman utama dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Menjelang akhir tahun anggaran, menurut Sri Paduka,	https://jogjaprov.go.id/berita/detail-berita/pengeसान-perubahan-kua-ppas-2025-gubernur-diy-apresiasi-sinergi-dprd			1. Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Indikator SIPD) : 0 dokumen dari 2 dokumen 2. Jumlah Dokumen Perubahan KUA yang Disusun : 0 dokumen dari 1 dokumen 3. Jumlah Dokumen Perubahan PPAS yang Disusun : 0 dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) - Terpenuhinya sarana pendu - Telah menyampaikan Pengh Perubahan Tahun 2025 Faktor Penghambat: Realisasi fisik terlaksana, terd berupa sisa angkas s.d. bulan 2.882.860,- terdiri dari : 1. Belanja makan minum rapi 2. Belanja bahan komputer R sisa angkas s.d. bulan Juni Faktor Pendukung: 1. Peraturan Daerah DIY No. APBD 2025 2. Peraturan Gubernur DIY No Kedudukan, susunan organis kerja Badan Pengelola Keuan 3. Peraturan Gubernur DIY No tentang Penjabaran APBD 20 4. DPA Nomor : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.0(Desember 2024 5. SDM yang kompeten 6. Sarana dan Prasarana yang

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik		Keuangan						Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni		Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Pr
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi							
												dokumen tersebut menjadi krusial untuk memastikan bahwa pelaksanaan program pemerintah tetap berjalan efektif, tepat sasaran, dan selaras dengan tantangan aktual yang dihadapi oleh daerah. Sri Paduka turut menegaskan bahwa sinergi antara legislatif dan eksekutif akan terus menjadi fondasi utama dalam menyusun arah kebijakan ke depan.						
2.1.3	5.02.02.1.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	306.766.000	8,00	67,00	-59,00	10.351.000	3,37	10.236.524	3,34	0,03						1. Jumlah DPA - SKPD yang diverifikasi (Indikator SIPD) : 32 dokumen dari 32 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) Melakukan koordinasi dengan penyesuaian anggaran pasca besaran rupiah untuk mata ai Faktor Penghambat: Aplikasi SIPD di beberapa wa berjalan lancar, sedikit mengi penyesuaian inputan di aplika Terdapat deviasi keuangan se terdiri dari : 1. Sisa angkas belanja kertas 2. Efisiensi Belanja bahan kor Faktor Pendukung: Dukungan sumber daya man koordinasi berjalan baik
2.1.4	5.02.02.1.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	630.528.500	6,00	6,00	0,00	24.080.000	3,82	19.711.496	3,13	0,69						1. Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Indikator SIPD) : 0 dokumen dari 2 dokumen 2. Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD : 0 dokumen dari 1 dokumen 3. Jumlah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD : 0 dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) Distribusi Perda dan Pergub A Faktor Penghambat: Terdapat deviasi keuangan se terdiri dari : 1. Belanja kertas dan cover si efisiensi 1. Belanja bahan cetak Rp. 2. s.d. bulan Juni , dikarenakan kebutuhan 2. Belanja makan minum rap dilaksanakan Faktor Pendukung: 1. Koordinasi dan kolaborasi stakeholder terkait dalam pel kegiatan 2. Komitmen dan kerjasama berkolaborasi dalam mewujudkan keuangan yang akuntabel
2.1.5	5.02.02.1.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	80.703.000	34,00	34,00	0,00	26.937.000	33,38	11.082.034	13,73	19,65	1. Strategi yang dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) DIY agar dampak dari penyesuaian belanja tidak berpengaruh terhadap target capaian indikator kinerja tahun 2025, salah satunya, melakukan efisiensi belanja yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi, dan seminar/focus group discussion. Pun, mengurangi belanja yang bersifat	https://jogjaprov.go.id/berita/detail-berita/wujudkan-target-kinerja-2025-diy-kurangi-belanja-seremonial , https://www.dprd-diy.go.id/fraksi-dprd-diy-tanggapi-nota-keuangan-raperda-perubahan-apbd-diy-2025/				1. Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Indikator SIPD) : 1 dokumen dari 2 dokumen 2. Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD : 0 dokumen dari 1 dokumen 3. Jumlah Peraturan Daerah tentang P Penjabaran Perubahan APBD : 1 dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) Rapat Koordinasi Perubahan Peraturan Gubernur No 17 Tahun 2024 tentang Penjabar Faktor Penghambat: Cetak fisik dokumen Peraturan Perubahan Penjabaran APBD perbedaan jumlah halaman , rencanakan sehingga realisas yang di butuhkan dan terdapi sebesar Rp. 11.883.4347,- kemudian untuk rekening Bel deviasi sebesar :: 1. Belanja alat tulis kantor Rp efisiensi 2. Belanja kertas dan cover R efisiensi 3. Belanja makan minum rap Faktor Pendukung:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Pr
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
												pendukung dan tidak memiliki output yang terukur. Hal demikian diungkapkan Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X saat menyampaikan Jawaban Gubernur DIY atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD DIY terhadap Bahan Acara Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DIY Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD DIY. 2. Melalui juru bicaranya, Yan Kurnia Kustanto, S.E., Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi rencana kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) meskipun terjadi penurunan pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat. Fraksi meminta penjelasan lebih lanjut terkait strategi optimalisasi PAD yang tidak membebani masyarakat kecil dan UMKM, serta langkah konkret dalam pemanfaatan aset daerah dan kontribusi BUMD					Koordinasi Internal serta koor berjalan baik
2.1.6	5.02.02.1.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	9.625.000	97,68	97,68	0,00	9.400.000	97,66	9.400.000	97,66	0,00					1. Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Indikator SIPD) : 0 dokumen dari 3 dokumen 2. Keputusan Gubernur tentang Penetapan Penerima Bantuan Keuangan : 0 dokumen dari 1 dokumen 3. Keputusan Gubernur tentang Penetapan Pengelola Keuangan Daerah : 0 dokumen dari 1 dokumen 4. Peraturan Gubernur tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai PMK dan Permendagri : 0 dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) Koordinasi dengan stakeholder pengaturan dan penyusunan Pergub tentang BLUD dan Piutang BLUD yang melibatkan Kemendagri, dan Kanwil Dirje Faktor Penghambat: sesuai target Faktor Pendukung: 1. Masukan dan hasil diskusi menjadi bahan pengaturan 2. SDM yang kompeten 3. Sarana dan Prasarana yang
2.2	5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/ Kota	16.823.300	25,46	25,46	0,00	4.215.300	25,06	4.215.300	25,06	0,00						
2.2.1	5.02.02.1.02.0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	5.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00					1. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota (Indikator SIPD) : 0 laporan dari 5 laporan 2. Evaluasi Raperda dan Raperkada APBD Kkota Yogyakarta : 0 laporan dari 1 laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni		Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Pr
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi							
																	3. Evaluasi Raperda dan Raperkada APBD Kabupaten Bantul : 0 laporan dari 1 laporan 4. Evaluasi Raperda dan Raperkada APBD Kabupaten Kulonprogo : 0 laporan dari 1 laporan 5. Evaluasi Raperda dan Raperkada APBD Kabupaten Gunung Kidul : 0 laporan dari 1 laporan 6. Evaluasi Raperda dan Raperkada APBD Kabupaten Sleman : 0 laporan dari 1 laporan	
2.2.2	5.02.02.1.02.0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	5.000.000	0,80	0,80	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00						1. JumlahLaporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota (Indikator SIPD) : 0 laporan dari 5 laporan 2. Evaluasi Raperda dan Reperkada tentang Perubahan APBD Kota Yogyakarta : 0 laporan dari 1 laporan 3. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Bantul : 0 laporan dari 1 laporan 4. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Kulonprogo : 0 laporan dari 1 laporan 5. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Kulonprogo : 0 laporan dari 1 laporan 6. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Sleman : 0 laporan dari 1 laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) Melakukan koordinasi interna Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
2.2.3	5.02.02.1.02.0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	5.000.000	61,62	61,62	0,00	3.056.000	61,12	3.056.000	61,12	0,00						1. Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Indikator SIPD) : 3 laporan dari 5 laporan 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota : 0 laporan dari 1 laporan 3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul : 0 laporan dari 1 laporan 4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kulonprogo : 1 laporan dari 1 laporan 5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Gunung Kidul : 1 laporan dari 1 laporan 6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sleman : 1 laporan dari 1 laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) Melaksanakan Evaluasi terhadap Perkada tentang Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Sleman, Kulonprogo dan Gunungkidul Tahun Anggaran 2019 Faktor Penghambat: sesuai target Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antara t. Paniradya, Biro Hukum, dan t. BPKA) dengan Pemerintah Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulonprogo
2.2.4	5.02.02.1.02.0012	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan	1.823.300	63,75	63,75	0,00	1.159.300	63,58	1.159.300	63,58	0,00						1. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan	Tahapan pekerjaan (fisik) Tersusunnya laporan keuangan Pemerintah Daerah dan data pendukungnya Faktor Penghambat: sesuai target

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Pr
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
		Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah														Daerah (Indikator SIPD) : 2 laporan dari 2 laporan 2. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah berupa Laporan Keuangan Dana Dekonsentrasi : 1 dokumen dari 1 dokumen 3. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah berupa Laporan Tugas Pembantuan : 1 dokumen dari 1 dokumen	Faktor Pendukung: Satker mengirimkan laporan t Koordinasi bisa dilaksanakan
2.3	5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	72.898.000	71,63	78,21	-6,58	51.937.200	71,25	49.620.206	68,07	3,18						
2.3.1	5.02.02.1.03.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	15.990.000	58,75	88,75	-30,00	9.340.000	58,41	9.226.500	57,70	0,71					1. Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan AliranK as, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (Indikator SIPD) : 1 laporan dari 2 laporan 2. Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas : 1 laporan dari 1 laporan 3. Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga : 0 laporan dari 1 laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) Mengikuti rapat rekonsiliasi di Ungaran pada tanggal 23-24 Faktor Penghambat: sesuai target, terdapat devias 4.549.500,- pada belanja mai Faktor Pendukung: Ketertiban dalam setoran BPJ memudahkan dalam pembua rekonsiliasi, karena tidak terd bisa dijelaskan
2.3.2	5.02.02.1.03.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	56.908.000	75,25	75,25	0,00	42.597.200	74,85	40.393.706	70,98	3,87					1. Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Indikator SIPD) : 5714 dokumen dari 8000 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) Diselenggarakan rapat rek BPD DIY PADA TANGGAL 16 : Faktor Penghambat: Terkadang info dari setoran S jadi butuh usaha untuk menc Terdapat deviasi keuangan se terdiri dari : 1. Belanja alat tulis kantor Rp 2. Belanja kertas dan cover R 3. Belanja cetak Rp. 88.500,- 4. Belanja bahan komputer R 5. Belanja makan minum rap Faktor Pendukung: Ketertiban dalam pencatatan dalam pembuatan angka di b karena tidak terdapat selisih
2.4	5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	255.912.500	58,51	57,89	0,62	145.954.300	57,03	140.348.951	54,84	2,19						
2.4.1	5.02.02.1.04.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	7.972.600	19,14	27,14	-8,00	1.252.600	15,71	1.252.600	15,71	0,00					1. Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Indikator SIPD) : 6 laporan dari 12 laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) Tersedianya bahan pendukung Faktor Penghambat: sesuai target Faktor Pendukung: 1. Peraturan Daerah DIY No. APBD 2025 2. Peraturan Gubernur DIY No Kedudukan, susunan organis kerja Badan Pengelola Keuan 3. Peraturan Gubernur DIY No tentang Penjabaran APBD 20 4. DPA Nomor : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.00

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Pr
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	Desember 2024 5. SDM yang kompeten 6. Sarana dan Prasarana yang
2.4.2	5.02.02.1.04.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	17.326.100	96,55	96,55	0,00	16.726.100	96,54	16.171.375	93,34	3,20	Dirjen PKN V BPK, RI Widhi Widayat menyampaikan penyerahan LHP DIY menjadi yang pertama kali dilakukan BPK RI terhadap LKPD pemerintah provinsi di tahun 2025, menjadikannya sebagai indikator kesiapan dan kinerja pengelolaan keuangan DIY yang unggul dibanding daerah lain. Pemda DIY kembali meraih predikat tertinggi opini WTP yang ke-15 kalinya berturut-turut. Pencapaian ini menandai keberhasilan DIY dalam mempertahankan opini WTP selama 15 tahun berturut-turut.	https://jogjaprov.go.id/berita/detail-berita/raih-wtp-ke-15-pemda-diy-segera-tindaklanjuti-rekomendasi-bpk			1. Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Indikator SIPD) : 2 laporan dari 3 laporan 2. Laporan Keuangan UnAudited 2024 : 1 laporan dari 1 laporan 3. Laporan Keuangan Audited 2024 : 1 laporan dari 1 laporan 4. Laporan Keuangan UnAudited 2025 : 0 laporan dari 1 laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) Laporan Keuangan UnAudited sudah disusun dan diserahkan mendapat opini WTP dari BPK sebagai Laporan Keuangan A 2024 Faktor Penghambat: Neraca dan LPE masih perlu secara manual karena hasil d Terdapat deviasi keuangan se terdiri dari : 1. Belanja alat tulis kantor Rp. 7. 2. Belanja bahan cetak Rp. 7. 3. Belanja makan minum rapi Faktor Pendukung: Aplikasi SIPD modul AKLAP s untuk penyusunan Laporan K
2.4.3	5.02.02.1.04.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	50.432.000	57,06	57,06	0,00	27.512.000	54,55	24.314.066	48,21	6,34	Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan penjelasan atas Rancangan Peraturan Daerah DIY tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DIY Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna (Rapur) DPRD DIY yang berlangsung pada Senin (02/06). Dalam sambutannya, Sri Sultan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung proses pengelolaan keuangan daerah sepanjang tahun anggaran 2024. Di hadapan para peserta Rapur DPRD DIY yang digelar di Gedung DPRD DIY, Sri Sultan mengungkapkan, penyampaian Raperda ini merupakan bagian dari tanggung jawab konstitusional dan wujud transparansi kepada publik. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) DIY Tahun	https://jogjaprov.go.id/berita/detail-berita/gubernur-diy-sampaikan-penjelasan-atas-raperda-pertanggungjawaban-pelaksanaan-apbd-2024			1. Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi (Indikator SIPD) : 2 dokumen dari 2 dokumen 2. Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD : 1 dokumen dari 1 dokumen 3. Raperda Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD : 1 dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) Raperda dan Rapergub Pertan di hantarkan oleh Gubernur di Faktor Penghambat: Beberapa lampiran perlu dilak hasil dari SIPD belum sempur harus dibuat secara manual Terdapat deviasi keuangan se terdiri dari : 1. Belanja bahan cetak Rp. 2. menyesuaikan kebutuhan 2. Belanja makan minum rapi Faktor Pendukung: Aplikasi SIPD sudah bisa men perda pergub sesuai SE Keme

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Pr
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
												Anggaran 2024 ini pun telah diaudit oleh BPK RI dengan hasil yang menunjukkan bahwa DIY kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-15 kalinya secara berturut-turut. "Prestasi dalam mempertahankan opini tersebut, tidak terlepas dari dukungan semua pihak, baik dari jajaran legislatif maupun eksekutif, yang senantiasa menjadi motivasi, untuk terus melakukan perubahan ke hal yang lebih baik lagi, terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah DIY," ungkap Sri Sultan.					
2.4.4	5.02.02.1.04.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	3.524.600	100,00	100,00	0,00	3.524.600	100,00	2.999.600	85,10	14,90	Ketua DPRD DIY, Bp. Nuryadi menegaskan bahwa DPRD sebagai lembaga legislatif memiliki fungsi pengawasan yang penting terhadap pelaksanaan APBD. Oleh karena itu, DPRD akan memastikan bahwa setiap rekomendasi dari BPK ditindaklanjuti secara serius oleh Pemda. Beliau juga menekankan pentingnya transparansi dan keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan keuangan. Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah hanya dapat tumbuh jika pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka, akurat, dan dapat diakses publik. "Tugas pengelolaan keuangan bukan hanya di tangan eksekutif, melainkan juga menjadi tanggung jawab legislatif dan seluruh pemangku kepentingan. Kita harus menjamin bahwa setiap rupiah APBD memberi manfaat maksimal	https://www.dprd-diy.go.id/raih-wtp-ke-15-kali-dprd-diy-komit-kawal-tindak-lanjut-rekomendasi-bpk/			1. Jumlah Dokumen Tanggapan/TindakLanjut terhadap LHPBPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Indikator SIPD) : 1 dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) LHP BPK atas Laporan Keuan diterima dengan Opini WTP Faktor Penghambat: OPD ada yang lambat meninc sehingga kita belum bisa mel temuan OPD ke BPK, terdapa 525.000,- pada Belanja maka Faktor Pendukung: OPD segera menindaklanjuti

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni		Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Pr
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi							
												bagi rakyat DIY,” jelasnya. Ketua DPRD mengajak seluruh pihak untuk menjadikan LHP BPK sebagai landasan dalam menyempurnakan sistem pengelolaan keuangan yang berorientasi pada kinerja dan hasil.						
2.4.5	5.02.02.1.04.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	3.489.000	100,00	100,00	0,00	3.489.000	100,00	2.339.000	67,04	32,96						1. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan danTuntutan Kerugian Daerah (Indikator SIPD) : 0 dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) Laporan Perkembangan atas Pemda DIY telah dikirimkan k Faktor Penghambat: Pihak tertuntut tidak mau me pemberitahuan TPTGR Koordinasi penyelesaian Tuntutan Kerugian Daerah m TGR OPD dari BPK Kemudian untuk tindak lanjut belum ada terdapat deviasi keuangan se terdiri dari : 1. Belanja bahan cetak sebes 2. Belanja makan dan minum Faktor Pendukung: Pihak - pihak yang kooperatif tuntutan ganti rugi
2.4.6	5.02.02.1.04.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	52.743.300	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00						1. Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Indikator SIPD) : 0 dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
2.4.7	5.02.02.1.04.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	8.974.900	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00						1. Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporandan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi (Indikator SIPD) : 0 orang dari 120 orang	Tahapan pekerjaan (fisik) Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
2.4.8	5.02.02.1.04.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	111.450.000	85,86	83,86	2,00	93.450.000	83,85	93.272.310	83,69	0,16	Komisi V DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Winston Rondo melakukan kunjungan kerja ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada 27–30 April 2025 untuk mempelajari pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).Yogyakarta dinilai lebih efisien dan progresif dalam memanfaatkan aset dan membangun fondasi PAD yang kuat.	https://www.harianmerapi.com/ekonomi/4015483423/taru-martani-raih-penghargaan-best-bumd-brand-equity-award-2025-dan-the-best-bumd-in-quality-product-and-service-excellence-of-the-year				1. Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina (Indikator SIPD) : 27 lembaga dari 27 lembaga	Tahapan pekerjaan (fisik) Fasilitasi dan koordinasi terka dan permasalahan-permasaal (dengan pengelola Mbiz, den Faktor Penghambat: Adanya kebijakan besar yang diselesaikan terkait pengguna (seharusnya pengusaha Non Mbiz sama), belum bisa Terdapat deviasi keuangan s merupakan efisiensi pada per Faktor Pendukung: Fasilitasi dan koordinasi dapa Bimbingan teknis dapat dilaks Petugas Akuntansi dan benda online atau by WA.
2.5	5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	799.427.804.654	60,57	77,33	-16,76	467.690.836.032	58,50	255.622.334.130	31,98	26,52							
2.5.1	5.02.02.1.05.0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	810.143.000	77,87	84,87	-7,00	620.279.000	76,56	570.379.000	70,40	6,16	”PT Taru Martani terus berinovasi untuk meningkatkan	https://www.harianmerapi.com/ekonomi/4015483423/taru-martani-raih-penghargaan-best-bumd-brand-equity-award-				1. Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Tahapan pekerjaan (fisik) Melaksanakan Rapat Evaluasi Tahun Buku 2025

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Pr
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
												kualitas Produk, sehingga cerutu Taru martini masih bisa mempertahankan pasar internasional di tengah tantangan iklim ekonomi global saat ini,” ungkapnya. Selain itu, sebagai BUMD Pangan dan Pertanian, PT Taru Martani tak sekedar bagaimana mendapatkan profit yang besar untuk mendukung pendapatan daerah, namun juga harus berkontribusi nyata untuk masyarakat di DIY dalam menggerakkan ekonomi daerah. “Kontribusi PT Taru Martani di antaranya dengan menjadi bagian dari Tim Pengendali Inflasi Daerah DIY. Sebagai BUMD Pangan dan Pertanian, kami bekerjasama dengan petani lokal, sebagai BUMD pangan dan pertanian kami sedang revitalisasi bangunan menjadi gudang pangan infrastruktur sistem logistik daerah, kami bekerja sama dengan petani lokal dan UMKM seperti budidaya tembakau kerjasama dengan petani DIY, menyerap gabah petani, pengelolaan beras di gudang Rice Mill pengusaha UMKM DIY, menyerap hasil panen petani kopi lereng Merapi, kemudian menyediakan komoditas pangan atau makanan pokok yang juga berasal dari petani lokal,” terang Widayat.	2025-dan-the-best-bumd-in-quality-product-and-service-excellence-of-the-year			(Indikator SIPD) : 1 laporan dari 6 laporan 2. Dokumen RKAT BUKP : 0 laporan dari 1 laporan 3. Dokumen Pengesahan Laporan Tahunan BUKP : 0 laporan dari 1 laporan 4. Dokumen Penetapan Pembagian Laba Bersih BUKP : 0 laporan dari 1 laporan 5. Dokumen Seleksi Calon Anggota Direksi 1 BUMD (PDAB 2-3 Direksi) : 0 laporan dari 1 laporan 6. Hasil Audit KAP atas Laporan Keuangan BUKP : 1 laporan dari 1 laporan 7. Kajian Teknis tentang evaluasi kinerja, kesehatan BUKP dan keberlangsungan usaha BUKP : 0 laporan dari 1 laporan	Berkoordinasi dengan seluruh tertib administrasi dan taat p berlaku dan agar meningkatk terhadap nasabah Kredit. Menyampaikan Surat Akhir m Bank BPD DIY dan Direksi Pe Tirtatama periode 2020-2025 Faktor Penghambat: Proses pembinaan BUKP terk data, pencatatan transaksi da terhadap data yang dibutuhkan BUKP yang satu dengan yang Terdapat deviasi keuangan se terdiri dari : 1. Belanja makan minum rap 2. Belanja Honorarium Narasi 3. Belanja iklan Rp. 5380.000 4. Belanja jasa konsultansi Rp Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik dengan BPKP, dan OJK terkait dengar BUKP.
2.5.2	5.02.02.1.05.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	338.278.412.318	43,00	80,00	-37,00	135.346.239.809	40,01	118.148.212.588	34,93	5,08					1. Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan : 5 laporan dari 5 laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) Verifikasi berkas pengajuan B Dana Keistimewaan Pengajuan Dana BKK dengan Tersalurkannya Bantuan Keua Keistimewaan kepada bebera Istimewa Yogyakarta Faktor Penghambat: 1. Realisasi fisik berkas peng akan tetapi realisasi keuangan ketersediaan dana dari pusat 2. ada beberapa berkas dari l lengkap syaratnya sehingga r kelengkapan berkas Faktor Pendukung: 1. Koordinasi dan kolaborasi stakeholder terkait dalam pel

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Pr
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	kegiatan 2. Komitmen dan kerjasama p berkolaborasi dalam mewujudkan keuangan yang akuntabel
2.5.3	5.02.02.1.05.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	23.134.539.170	34,75	34,75	0,00	8.000.000.000	34,58	0	0,00	34,58					1. Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak : 0 laporan dari 1 laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) Terlaksananya koordinasi inte pendukung pencairan dana di Faktor Penghambat: Anggaran bersifat persediaan Faktor Pendukung: 1. Koordinasi dan kolaborasi c stakeholder terkait dalam peli kegiatan 2. Komitmen dan kerjasama p berkolaborasi dalam mewujudkan keuangan yang akuntabel
2.5.4	5.02.02.1.05.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	437.204.710.166	75,50	77,50	-2,00	323.724.317.223	74,04	136.903.742.542	31,31	42,73					1. Jumlah Laporan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Propinsi : 1 laporan dari 1 laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) Terealisasi nya Belnnya bagi h Tahun 2025 4 Kabupaten Terealisasi nya Belnnya bagi h Tahun 2025pada Kota Yogyakarta Faktor Penghambat: Bahwa besaran bagi hasil paj perhitungan / transfer dari pu hasil Triwulan II di realisasika Faktor Pendukung: 1. Peraturan Daerah DIY No. APBD 2025 2. Peraturan Gubernur DIY N Kedudukan, susunan organis kerja Badan Pengelola Keuan 3. Peraturan Gubernur DIY N tentang Penjabaran APBD 20 4. DPA Nomor : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.0 Desember 2024 5. SDM yang kompeten 6. Sarana dan Prasarana yang
3	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	3.477.111.900	35,74	43,59	-7,85	1.178.719.700	33,90	1.094.135.119	31,47	2,43						
3.1	5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.477.111.900	35,74	43,59	-7,85	1.178.719.700	33,90	1.094.135.119	31,47	2,43						
3.1.1	5.02.03.1.01.0001	Penyusunan Standar Harga	317.064.000	5,39	5,39	0,00	14.092.000	4,44	11.883.000	3,75	0,69					1. Jumlah Standar Harga yang Disusun (Indikator SIPD) : 0 dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) Desk usulan SHBJ TA 2026 Desk usulan SHBJ Perubahan Rapat koordinasi kebijakan SI Rapat koordinasi kebijakan SI Faktor Penghambat: Dinamika harga barang di pa Terdapat deviasi keuangan se terdiri dari : 1. Belanja alat tulis kantor Rp 2. Belanja kertas dan cover R 3. Belanja bahan komputer R 4. Belanja makan dan minum Faktor Pendukung: Koordinasi dan komunikasi ya TAPD dan OPD sehingga dina SHBJ dapat diatasi dengan be Tersedianya SDM yang berkui pendukung sehingga kegiatan
3.1.2	5.02.03.1.01.0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	82.221.600	99,20	99,20	0,00	80.861.600	98,35	80.734.600	98,19	0,16					1. Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Indikator SIPD) : 0 Dokumen dari 2 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) Rapat koordinasi penyusunan Pendampingan Penyusunan R Terlaksananya pengembangan Faktor Penghambat: sesuai target Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik dengan

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Pr
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	penyusunan RKBMD dapat be Tersedianya SDM yang berkui pendukung sehingga kegiatar
3.1.3	5.02.03.1.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	239.897.000	52,38	52,38	0,00	125.411.000	52,28	124.920.800	52,07	0,21					1. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Indikator SIPD) : 1 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) Pendampingan penyusunan k Pendampingan penyusunan k Terlaksananya pengembangai Persediaan Faktor Penghambat: Terdapat deviasi keuangan se terdiri dari : 1. Belanja Alat Tulis Kantor R 2. Belanja kertas dan cover R 3. Belanja makan minum rapi 4. Efisiensi pada Belanja Jasa Informasi sebesar Rp. 327.05 Faktor Pendukung: Kolaborasi yang baik antara E proses penyusunan laporan a berjalan dengan baik Tersedianya SDM yang berkui pendukung sehingga kegiatar
3.1.4	5.02.03.1.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	2.153.066.800	25,75	38,65	-12,90	498.154.600	23,14	462.465.687	21,48	1,66					1. Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Indikator SIPD) : 1 Laporan dari 2 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) Pengecekan fisik dan penguku sertifikasi tanah Pemeliharaan rumah dinas da Rapat koordinasi terkait peng BMD dengan pihak-pihak terk Faktor Penghambat: Lokasi BMD yang tersebar di : pengamanan belum bisa opti Terdapat deviasi keuangan se terdiri dari : 1. Belanja BBM Rp. 272.250,- 2. Belanja kertas/cover Rp. 30 3. Belanja bahan komputer R 4. Belanja tagihan listrik Rp. 4 5. Belanja keanggotaan Rp. 4 6. Belanja pajak Rp. 71.685,- 8. Belanja pemeliharaan gedu efisiensi Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik dengan berkepentingan sehingga keg dengan lancar Tersedianya SDM yang berkui pendukung sehingga kegiatar
3.1.5	5.02.03.1.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	205.879.500	26,90	26,90	0,00	54.979.500	26,70	53.513.900	25,99	0,71					1. Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Indikator SIPD) : 1 Laporan dari 3 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) Kontrak penilaian BMD dalam Kegiatan lapangan dalam ran Maloboro Rapat koordinasi dalam rangk Faktor Penghambat: Terdapat deviasi keuangan se terdiri dari : 1. Belanja makan minum rapi 2. Belanja jasa konsultansi R Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik dengan sehingga agenda penilaian da
3.1.6	5.02.03.1.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	478.983.000	85,28	84,28	1,00	405.221.000	84,60	360.617.132	75,29	9,31					1. Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Indikator SIPD) : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 2. Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa pemindahtanganan : 0 dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) Verifikasi data kendaraan ber lelang ke KPKNL dengan men Cek fisik kendaraan yang aka Dishub DIY Penjualan sisa bongkaran dar pimpinan Dewan Cek lapangan terhadap BMD penghapusan oleh OPD Sosialisasi pembongkaran jen kepada Masyarakat di sekitar Faktor Penghambat: Adanya permintaan kendaraa

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Keuangan								Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni		Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Pr
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi							
																	3. Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Dokumen Pemusnahan BMD : 1 dokumen dari 1 dokumen 4. Jumlah h Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Dokumen Penghapusan BMD : 0 dokumen dari 1 dokumen	hapus untuk kendaraan dinas praktek sehingga proses verif dari jadwal Terdapat deviasi keuangan se terdiri dari : 1. Belanja makan minum rapi 2. Belanja jasa keamanan Rp. 3. Belanja iklan/promosi Rp. : 4. Belanja sewa angkutan Rp. 5. Belanja js konsultansi Rp. ! 6. Belanja Pemeliharaan gedu Faktor Pendukung: Komunikasi antar OPD terjalir segala dinamika di lapangan Usulan penghapusan BMD da bernilai ekonomis sehingga bi pemindahtanganan lewat per Tersedianya SDM yang berkui pendukung sehingga kegiatan
4	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.953.433.500	76,68	76,78	-0,10	2.261.920.550	76,59	2.117.559.300	71,70	4,89							
4.1	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.953.433.500	76,68	76,78	-0,10	2.261.920.550	76,59	2.117.559.300	71,70	4,89							
4.1.1	5.02.04.1.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	2.716.454.400	79,20	79,20	0,00	2.149.157.000	79,12	2.019.022.300	74,33	4,79						1. Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Indikator SIPD) : 1 Dokumen dari 2 Dokumen 2. DPA Pendapatan Tahun Anggaran 2026 : 0 dokumen dari 1 dokumen 3. DPA Pendapatan Tahun Anggaran 2025 Perubahan : 1 dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) Pengadaan Plastik dan Blangl Pelunasan Kewajiban Pembay Terlaksananya Bimtek Kesam KPPD Kota Yogyakarta Terlaksananya Desk RKA Pen Perubahan 2025 Terlaksananya pelayanan pen di Samsat Corner Galeria Mall Terlaksananya Pengadaan Rel Terlaksananya Pengadaan Ap Pelayanan di Samsat Corner Faktor Penghambat: Pada saat pelayanan WP di sa Keterbatasan jumlah petugas antrean yang panjang, kemua gangguan jaringan internet y terhambatnya pelayanan, teri sebesar Rp. 130.134.700,- ter 1. Belanja alat tulis kantor Rp merupakan sisa angkas s.d. J pengadaan balngko dan plast 99.000.000,- 2. Belanja cetak Rp. 50.000,- 3. Belanja bahan komputer R 4. Belanja makan minum rapi 5. Belanja mamin aktifitas lap 6. Belanja Honor Tim Rp. 5.7 7. Belanja jasa layanan umum 8. Belanja Js konsultansi apli Faktor Pendukung: Koordinasi baik dengan Peny pengadaan terlaksana sesuai Adanya dukungan penuh dari peserta dari petugas pelayanan Koordinasi antar OPD Berpen lancar Lokasi yang strategis di pusat mudah dijangkau
4.1.2	5.02.04.1.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	19.867.100	77,47	77,47	0,00	15.388.550	77,46	14.922.000	75,11	2,35						1. Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Indikator SIPD) : 1 Laporan dari 5 Laporan 2. Laporan Dana Keistimewaan : 0 laporan dari 1 laporan 3. Laporan DID : 0 laporan dari 1 laporan 4. Laporan DAK Fisik : 1 laporan dari 1 laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) Terlaksananya Rapat Rekonsil Anggaran 2024 di Gedung Ra Tercapainya dalam mencetak Penyerapan Dana Keistimewa Anggaran 2025 Terlaksananya Rapat Koordini OPD Pengguna Dana Transfer Faktor Penghambat: Terdapat deviasi keuangan se Faktor Pendukung:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Pr
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																5. Laporan DAK Non Fisik : 0 laporan dari 1 laporan 6. Laporan DBH : 0 laporan dari 1 laporan	Koordinasi yang baik antar Pe Pemkab/Pemkot dengan DJP Koordinasi yang baik antar OI Inspektorat sebagai APIP, dan Keuangan selaku Penyalur Da koordinasi intensif dengan Of Transfer untuk percepatan pe
4.1.3	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	157.402.000	46,17	46,17	0,00	72.660.000	46,16	59.850.000	38,02	8,14					1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Indikator SIPD) : 1 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) Terlaksananya Siaran Langsung Narasumber dari Kanwil Direk sebanyak 6 kali di Triwulan II Faktor Penghambat: Waktu siaran terbatas untuk i mendalam Terdapat deviasi keuangan se merupakan Belanja bahan cel Faktor Pendukung: Narasumber kompeten yang i materi dengan baik dan tersik terencana yang disepakati ke
4.1.4	5.02.04.1.01.0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	32.710.000	50,56	59,56	-9,00	16.090.000	49,19	15.215.000	46,51	2,68					1. Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Indikator SIPD) : 6 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) Terlaksananya implementasi p 2025 Terlaksananya Rapat Pembina Faktor Penghambat: Terdapat deviasi keuangan se belanja makan minum rapat Faktor Pendukung: Fasilitas rapat yang memadai Koordinasi antar OPD Berpeni baik
4.1.5	5.02.04.1.01.0014	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	27.000.000	32,50	32,50	0,00	8.625.000	31,94	8.550.000	31,67	0,27					1. Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Indikator SIPD) : 0 Laporan dari 2 Laporan 2. Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Semester 1 : 0 laporan dari 1 laporan 3. Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Semester 2 : 0 laporan dari 1 laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) Terlaksananya Rapat Koordini Laporan ETPD Semester 1 Faktor Penghambat: Terdapat deviasi keuangan se Belanja makan minum rapat Faktor Pendukung: Hadirnya peserta dari OPD Be dan adanya narasumber dari Indonesia DIY yang kompete
Jumlah			886.124.524.586	59,13	74,96		507.281.441.151	57,25	283.425.620.688	31,98							